



Analisis Penerapan *E-Government* Melalui Aplikasi SIMDA pada Subbag Keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat

Nilia Safrida¹, Nodi Marefanda², Dara Amelia³

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

³Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: November 24, 2021
 Revised: Desember 12, 2021
 Accepted: January 2, 2022
 Available online: February 31, 2022

KEYWORDS

SIMDA Keuangan, E-Government, Implementasi Kebijakan

CORRESPONDENCE

Phone: +6282247087437
 E-mail: safriidnila@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to analyze the application of e-government through the SIMDA application at the Transmigration and Manpower Office of West Aceh Regency. using qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews and observations, where researchers used purposive techniques, data were analyzed by means of reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that if the implementation of financial SIMDA is well implemented, where the users understand and support the SIMDA use policy, but network resources and human resources are still lacking, financial SIMDA also does not exist, followed by structures that do not match the needs so that tasks overlap. The existence of financial SIMDA has supported the implementation of e-government, because it is a digital application that is easy to use, the information produced is reliable and data security is maintained, data content is accurate with a simple display, and users and beneficiaries strongly support the implementation of financial SIMDA, but there is no interaction forum. between the user and the user system. So it can be said, although there are some shortcomings in the description of the research results, it does not have a major impact on the effectiveness, accountability, auditability, transparency and efficiency of the use of financial SIMDA in the Aceh Barat Distranaker.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang maraknya penggunaan teknologi informasi di setiap sendi kehidupan tak dapat dipisahkan dari dampak globalisasi. Globalisasi seolah menjadi gerbang penuntun masuknya peradaban pada era baru yang disebut era digital akibat revolusi industri 4.0. *Impact* digitalisasi akhirnya tidak hanya mengharuskan pembaharuan berbasis teknologi informasi pada rutinitas aktivitas masyarakat, namun juga pada entitas sektor publik yang notabeneanya adalah pemerintahan. Keberadaan teknologi informasi disinyalir dapat mencerminkan wujud transparansi, akuntabilitas, adaptif, dan transformatif dari pemerintahan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat melalui kemudahan akses informasi diikuti pengelolaan data secara digital/elektronik. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* ditandai reformasi birokrasi

pemerintahan menjadi berbasis elektronik. *The U.S Electronic Government Act of 2002*, mendefinisikan *E-government* sebagai pemerintah yang memanfaatkan *website* hingga aplikasi berbasis internet melalui penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan serta mempermudah komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat agar mewujudkan pelayanan berkualitas, efektif, efisien dan transformatif (*Authenticated U.S Government Information, 2002*).

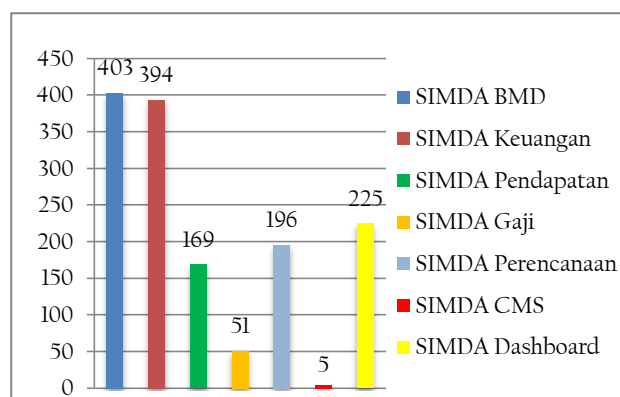
Realisasi konsep *e-government* bukan hanya berlaku pada pemerintahan pusat saja, namun juga pemerintah daerah yang dianugerahi gelar otonomi khusus didasarkan pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah seperti Aceh. Ruang lingkup pemerintah daerah umumnya berupa pemerintahan pada tingkat provinsi sampai kabupaten, sehingga setiap Pemda memiliki wewenang, hak, dan kewajiban yang sama untuk mengelola atau mengatur urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan

dengan tujuan utama mewujudkan *Good Governance* (pemerintah yang baik). Kolaborasi antara teknologi informasi dan pengelolaan keuangan menjadi sangat diperlukan, sehingga PP No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dikeluarkan untuk mengatur pengelolaan keuangan berbasis teknologi dengan maksud mendigitalisasikan kegiatan pengelolaan keuangan, serta menghasilkan data akurat dalam waktu singkat. Berpegang pada institusi tersebut.

BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebagai pihak audit internal keuangan pemerintah berusaha memfasilitasi Pemda dalam mengelola keuangannya melalui penyusunan program aplikasi sistem informasi berkonsep *e-government* bernama Simda (sistem informasi manajemen daerah), yang telah diperkenalkan sejak Agustus 2006 silam (BPKP, 2020). Kemunculan SIMDA dilatar belakangi oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan ASN No. 13 tahun 2003 terkait Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Instansi Pemerintah.

Sejak resmi diberlakukan, Simda telah mengalami berbagai tahap perubahan hingga menjadi versi terbaru (versi tahun 2021). Dalam penerapannya, aplikasi ini berpedoman pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah & Pengembangan Simda. Pada dasarnya Simda memiliki spesifikasi beragam, salah satunya adalah Simda keuangan. Simda keuangan dapat diartikan sebagai produk aplikasi pengelola keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku untuk menjadikan tata kelola keuangan pemda auditabel, transparan, efektif, akuntabel dan efisien (Polii & Pontoh, 2018). Oleh sebab itu,, tak salah jika SIMDA sering dimaknai sebagai sistem yang mempermudah kegiatan akuntansi, meliputi pertanggungjawaban, perencanaan, dan pengelolaan keuangan dalam sistem database (Hertanto *et al*, 2016). Output dari penggunaan sistem informasi manajemen ini berupa dokumen penganggaran (RKA & RAPBD), penatausahaan (SPD, SPM, SPJ, SP2D& SIS), serta akuntansi dan pelaporan (LRA & Neraca) (Dewi & Mariska, 2018). Secara keseluruhan, Simda keuangan hanya diterapkan pada 394 instansi Pemda di Indonesia (Yanto & A, 2020).

Keberadaan Simda menjadi hal yang harus diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah termasuk Pemda, yang sebelumnya telah diatur dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah. Simda terbagi dalam beberapa jenis yaitu Simda BMD (Barang Milik Daerah), pendapatan, gaji, perencanaan, CMS (*Cash Management System*), *Dashboard* dan Simda keuangan. SIMDA keuangan menjadi Simda yang peneliti analisis sebab menjadi Sistem Informasi Manajemen yang banyak digunakan oleh instansi pemerintahan daerah (pemda). Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah pengguna aplikasi Simda di Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan Grafik 1:



Grafik 1. Jumlah Pemerintah Daerah Pengguna Aplikasi SIMDA Berdasarkan Spesifikasi di Indonesia Tahun 2020

Sesuai penampakan pada Grafik 3. dapat dijabarkan jika Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah) terbagi dalam beberapa jenis/spesifikasi khusus yaitu 1). Simda BMD (Barang Milik Daerah) dengan 403 pemda pengguna yang bertugas menaungi segala aktivitas pengelolaan keuangan terkait pembiayaan barang milik daerah 2). Simda Keuangan (394 Pemda pengguna) sebagai aplikasi khusus pengelolaan keuangan secara kompleks, 3). Simda Pendapatan (169 Pemda pengguna) yang digunakan untuk mengelola laporan keuangan dan optimalisasi retribusi serta pajak daerah, 4). Simda Gaji (51 pemda pengguna) menjadi aplikasi khusus dalam pengelolaan gaji pegawai atau ASN di Indonesia, 5). Simda *Integrated* atau perencanaan (196 Pemda pengguna) selaku program aplikasi yang digunakan dalam proses perencanaan jangka pendek maupun menengah daerah dengan turut berperan pada penyusunan renstra (rencana strategis) setiap SKPK, 6). Simda CMS (*Cash Management System*) dipakai oleh lima Pemda yang merupakan Simda layanan perbankan terkhusus mengenai pencairan kas dan SP2D, 7). Simda *Dashboard* atau Simda informasi manajerial, dibutuhkan dalam pembuatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan dipakai oleh 225 pemda yang bertindak sebagai aplikasi pembantu proses pengambilan keputusan SKPK.

Total pengguna Simda di Indonesia berjumlah 440 Pemda dan 394 Pemda diantaranya menggunakan aplikasi Simda keuangan, ini menunjukkan jika posisi Simda keuangan berperan besar dalam pengelolaan dan manajemen keuangan pemerintah Indonesia, sehingga pengkajian tentangnya merupakan hal yang tepat.

Sebagai salah satu Pemda yang merealisasikan Simda keuangan adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Meulaboh, dengan spesifikasi lingkup pengoperasian pada Subbag keuangan sesuai Peraturan Bupati Aceh Barat No. 61 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun Anggaran 2021. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) merupakan salah satu instansi Pemda yang memiliki wewenang dalam mengelola berbagai permasalahan ketenagakerjaan di kabupaten dan menjadi Dinas Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja, serta kedinasan yang bertanggung jawab dalam melakukan survei lokasi perkembangan daerah transmigrasi.

Kedinasan ini memiliki tugas kompleks dengan penganggaran pelaksanaan kegiatan yang harusnya efektif dan efisien agar pelaksanaan program memberi manfaat layanan maksimal bagi masyarakat, sehingga posisi Subbag keuangan menjadi hal paling urgen dalam proses penyelenggaraan

aktivitas bidang kedinasan. Maka, pemilihan lokasi penelitian sangatlah tepat. Keterkaitan Simda dan teknologi informasi memang pada dasarnya menimbulkan pro kontra. Di satu sisi Simda memberikan nilai positif pada pendigitalisasi aktivitas keuangan sesuai konsep *e-government*, akan tetapi, di sisi lain realisasi ini justru menimbulkan masalah tatkala sistem aplikasi eror, tidak adanya pedoman prosedur penggunaan, serta kuantitas SDM selaku user Simda yang belum mencukupi sehingga dapat menghambat proses penganggaran.

Oleh sebab itu, hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan pada rumusan masalah mengenai bagaimana peranan Simda dalam mewujudkan konsep *e-government*, berhasil tidaknya penerapan pemerintahan elektronik melalui Simda keuangan dalam memberikan kemudahan pengelolaan keuangan di Distranaker, bagaimana proses kerja menggunakan Simda, serta apa saja kendala dan dukungan dalam realisasi aplikasi Simda. Sangat diperlukan suatu analisis dalam menilai realisasi Simda keuangan selaku usaha perwujudan *e-government*, agar berbagai hal yang sekiranya dapat menjawab rumusan masalah muncul dan membantu perbaikan maupun memberikan alternatif solusi dalam implementasi *e-government* melalui SIMDA keuangan khususnya pada lingkup pemda yang memiliki wewenang otonomi khusus.

Tujuan penelitian ini adalah menjabarkan peranan Simda dalam mendukung *e-government*, keberhasilan penerapan Simda dalam memudahkan pengelolaan keuangan di Distranaker, mengetahui prosedur kerja menggunakan Simda keuangan, penerapannya dalam pengelolaan keuangan, mengetahui kendala yang dihadapi dan dukungan yang diberikan dalam perealisasi Simda keuangan, diikuti penjabaran penilaian indikator *e-government* pada dinas terkait dengan maksud khusus menjawab serta memberi solusi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Penilaian perihal implementasi kebijakan pemberlakuan Simda akan dinilai dengan teori implementasi Edward III dan penjabaran tentang *e-government* memakai pandangan Papadomichelaki & Mentzas mengenai layanan berkualitas pada *e-government*.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Tepatnya di Jln. Ujong Beurasok, Gampong Lapang Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Menurut Gumilar dalam (Somantri, 2005) penelitian kualitatif adalah metode penelitian menggunakan pendekatan berupa pengukuran fakta dari suatu objek melalui penjabaran konsep pada variabel-variabel dan indikator-indikator dengan memperhatikan aspek reliabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai informan, melakukan observasi dan studi literatur dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk kemudian didalam dan menemukan pendukung permasalahan (Herdiansyah, 2011). Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive* (penentuan informan karena kriteria tertentu) dengan pemilihan subjek dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Silalahi, 2009). Berikut tabel daftar informan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Instansi	Ket
Sari Novi	Kasubbag	Distranaker	Pengguna
Saputri, SE, Ak	Keuangan	Aceh Barat	
Merrie Yunita, SE	Bendahara Pengeluaran	Distranaker Aceh Barat	Pengguna
Radhiah Nur	ASN	Distranaker Aceh Barat	Penerima manfaat
Aisyah Adha Wulan	Tenaga Harian Lepas (THL)	Distranaker Aceh Barat	Penerima manfaat

Sumber: Data Penelitian



Gambar 1. Wawancara bersama Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Distranaker Aceh Barat

Peneliti menggunakan teori implementasi Edward III (Edward. III, 1980), meliputi penilaian akan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur organisasi. Peneliti juga memakai teori enam variable (Papadomichelaki & Gregoris, 2012), tetapi kali ini peneliti hanya menggunakan lima variabel yang relevan dalam menilai kualitas layanan *e-government* mencakup *ease of use*, *trust*, *content and appearance of information*, *citizen support* dan *functionality of the interaction environment* untuk menganalisis penerapan Simda keuangan pada lokus (lokasi) penelitian. Setelah data hasil penelitian didapatkan, selanjutnya data memasuki tahapan reduksi (pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan), penyajian data (informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, serta diikuti tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan (melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang akurat) (Sutopo & Arief, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan Simda dan Simda Keuangan

Sistem Informasi merupakan kesatuan dari beberapa unsur yang saling berinteraksi yang dimanfaatkan untuk pengolahan data atau informasi dengan maksud memenuhi tujuan yang diinginkan. Sistem informasi kini telah banyak dimanfaatkan dalam memudahkan aktivitas, salah satu diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM dapat diartikan sebagai serangkaian unsur mewakili sistem Informasi yang terdiri dari tahapan *input* (masukan), *processing* (pengolahan) dan *output* (keluaran) (Kumorotomo, 2004). Mcleod, keberadaan SIM (Sistem Informasi Manajemen) sering kali digunakan oleh banyak orang dalam hal serupa misalnya mengelola keuangan (Mcleod, 2010).

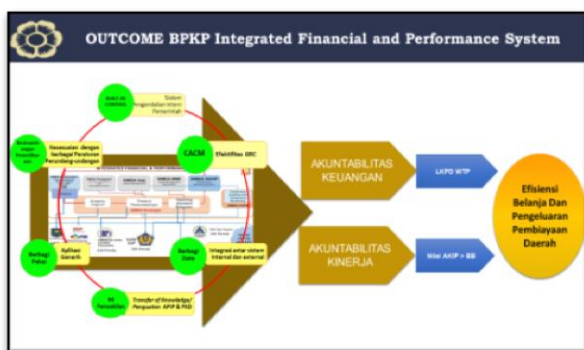
Penerapan sistem informasi manajemen telah menjadi keharusan sejak lama pada pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga Simda (Sistem Informasi Manajemen

Daerah) menjadi acuan wajib saat mengkaji Sistem Informasi Manajemen. Simda merupakan keluaran dari usaha pemerintah untuk memenuhi serta memfasilitasi kebutuhan akan pengelolaan informasi keuangan dalam hal administrasi pemerintahan agar menunjang pelayanan menjadi terpadu (cepat, tepat, akurat dan lengkap) (Darea & Elim, 2015). Deskripsi lebih lanjut tentang Gambaran umum dari aplikasi Simda dapat dilihat pada Gambar. 2 dan untuk mengetahui keunggulan dan manfaat penggunaan Simda dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 2. Gambaran Umum Simda
Sumber: bpkp.go id (2020)

Berdasarkan gambar 2 diatas, dijelaskan jika secara umum kebijakan terkait realisasi Simda telah mengalami berbagai pembaharuan peraturan sejak 2002, dimulai dari Permendagri No. 29 tahun 2002 hingga Perpres No. 95 tahun 2018 yang masih berlaku sampai 2021. Secara garis besar Simda terbagi dalam lima jenis (perencanaan, pendapatan, gaji, BMD, dan SAKIP/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dibawah naungan tim Simda CACM (*Continuous Auditing Continuous Monitoring*) sebagai pihak penanggung jawab sistem aplikasi Simda, meski ragam Simda secara khusus telah terbagi dalam tujuh program aplikasi seperti yang diuraikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Keunggulan dan Manfaat Penggunaan SIMDA
Sumber: bpkp.go id (2020)

Gambar 3 sedikit banyak menjelaskan jika keseluruhan kerjasama elemen dalam implementasi Simda mulai dari proses *built-in control* (sistem pengendalian intern pemerintah) yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menciptakan suatu aplikasi generik (ragam aplikasi Simda) untuk dapat mewujudkan proses *transfer of knowledge*, didukung kemampuan mengintegrasikan aktivitas pihak internal dan eksternal pemerintah terkait manajerial anggaran yang selalu dikontrol, serta senantiasa dikembangkan oleh

pihak CACM (*Continuous Auditing Continuous Monitoring*) dengan tujuan menciptakan akuntabilitas penggunaan anggaran dan akuntabilitas kinerja pegawai pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi belanja dan pembiayaan aktivitas pemerintahan daerah.

Implementasi Simda Keuangan

Implementasi Simda keuangan dalam penelitian ini ditekankan pada penilaian penerapan kebijakan tersebut dengan lokus penelitian Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meulaboh, khususnya di Subbag Keuangan. Sebelum menjabarkan penilaian terhadap suatu kebijakan, tentu penggunaan pandangan seorang ahli seperti George C.Edward III melalui hasil pemikiran yang dikenal sebagai Teori Edward III merupakan hal yang tepat. Edward dalam (Rahantoknam et al., 2017), menjelaskan jika keberhasilan suatu kebijakan dapat dinilai dari empat indikator yang mempengaruhi, yaitu

Pertama, penilaian dari keberhasilan *communication* (komunikasi). Sebagai pihak pelaksana kebijakan terkait realisasi SIMDA Keuangan. Subbag keuangan telah menunjukkan keberhasilan komunikasi yang cukup baik, karena pengguna telah mampu menjalankan aplikasi sesuai tanggung jawab jabatannya meski melalui pembelajaran secara otodidak. Namun, yang menjadi kelemahan dari penilaian pada indikator komunikasi adalah belum pernah ada pelatihan penggunaan Simda keuangan di lingkup Pemda Aceh Barat termasuk pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meulaboh selama beberapa tahun terakhir (sejak 2009), akibatnya saat aplikasi Simda keuangan di *update* karena pembaharuan sistem setiap tahunnya, akan menyulitkan pengguna memahami fitur-fitur aplikasi terbaru sehingga dirasa kurang efektif. Hal ini pun diperparah apabila terjadi pergantian pegawai termasuk *user* SIMDA keuangan, sebab user baru harus mulai membiasakan diri dengan aplikasi SIMDA tanpa panduan yang berakibat pada perlambatan kinerja kedinasan maupun SKPK dalam mengelola keuangan.

Kedua, *resource* (sumber daya) berperan sangat penting dalam implementasi kebijakan, sebab apabila sumber daya kurang meski kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, maka kebijakan tidak bisa dijalankan karena setiap kebijakan diperlukan amunisi agar dapat diterapkan. Sumber daya manusia sebagai pengguna Simda Keuangan di Distranaker telah memiliki *skill* mumpuni dalam pengolahan berbagai data keuangan berbasis digital, Kendala yang dihadapi ialah masih kurangnya staf pembantu akuntansi yang sebenarnya memiliki tugas menggunakan aplikasi Simda keuangan, akibatnya untuk saat ini berbagai tugas staf akuntansi masih dilimpahkan pada Kasubbag dan Bendahara Subbag Keuangan sehingga berimbas pada kurang efektif dan efisiennya kinerja. Selain itu, masih kerap terjadi masalah pada sumber daya jaringan, apabila jaringan internet bermasalah, maka kinerja Subbag Keuangan terhambat sebab basis Simda keuangan adalah aplikasi utama pengolahan data keuangan yang berbasis *online*.

Ketiga, *disposition* (sikap), pengguna Simda dan penerima manfaat memberikan apresiasi baik terkait putusan keharusan penggunaan Simda keuangan, karena dengan Simda Keuangan Pekerjaan Bidang maupun Subbag Keuangan menjadi lebih mudah dan terkoordinir dengan baik. Keempat, *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) terkait SOP dan fragmentasi struktur birokrasi. Berbicara tentang SOP atau pedoman, saat ini pihak kedinasan belum memiliki pedoman baku dalam

menggunakan Simda keuangan, bahkan pelatihan atau sosialisasi belum pernah ada dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Salah satu informan menyatakan jika hanya pernah mengikuti bimtek atau bimbingan teknis penggunaan Simda terakhir kali pada tahun 2009, sehingga pegawai baru yang menjadi bendahara harus belajar secara otodidak maupun diajarkan oleh bendahara sebelumnya. Ini menunjukkan jika masih kurang optimalnya persiapan pemerinah dalam menerapkan Simda Keuangan di Aceh Barat. Mengenai fragmentasi struktur birokrasi, pada lokasi penelitian justru bukan menunjukkan fragmentasi (struktur birokrasi terlalu panjang), namun kurangnya jumlah staf pengisi struktur birokrasi, padahal telah ada aturan tentang struktur pengurusan baku tetapi beberapa posisi masih kosong atau belum terisi.

Berdasarkan uraian analisis tentang implementasi Simda Keuangan, implementasi Simda di Distranaker sudah cukup berhasil, dinilai dari kemampuan penggunaannya memahami tugas, telah memiliki skill mumpuni dalam mengakses aplikasi, dan sikap pengguna maupun penerima manfaat aplikasi SIMDA juga memberikan respons positif. Namun, keberhasilan tersebut belum secara sempurna, masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan subbag keuangan dan realita yang dihadapi, yaitu kekurangan staf, kendala jaringan internet, tidak terdapat SOP atau pedoman penggunaan SIMDA, tidak adanya sosialisasi penggunaan, diikuti belum terpenuhinya struktur birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan subbag keuangan.

Peranan SIMDA Keuangan dalam Mendukung E-Government

Indikator yang peneliti gunakan pada penelitian ini hanya lima variabel tanpa *reliability* (keandalan), dikarenakan penjabaran maksud indikator tersebut akan sama dengan indikator implementasi Edward III poin resources (sumber daya). Berdasarkan hasil penelitian pada lokus (lokasi) penelitian dapat dijelaskan bahwa analisis kualitas layanan *e-government* melalui Simda keuangan berdasarkan teori layanan berkualitas Papadomichelaki & Mentzas (Papadomichelaki & Gregoris, 2012), sebagai berikut:

Pertama, *ease of use* (kemudahan penggunaan) ialah kemudahan dalam memakai layanan berbasis *e-government* (aplikasi, website dan lain sebagainya). Tampilan aplikasi SIMDA keuangan cukup mudah dimengerti, sebab memiliki tampilan sederhana dan mudah dipahami apabila tekun dipelajari meski punya fitur beragam. Dapat terlihat dari gambar. 5 dibawah ini.



Gambar 4. Tampilan Beranda Aplikasi Simda keuangan
Sumber: Laptop Bendahara Distranaker Aceh Barat

Terlihat pada Gambar 4 jika fitur yang disediakan Simda Keuangan beragam akibat banyaknya data yang perlu diolah dalam sistem informasi manajemen ini, tampilan aplikasi Simda Keuangan cukup sederhana sehingga memenuhi indikator kemudahan penggunaan pada *e-government*. Kedua, *trust* (kepercayaan), diartikan tingkat kepercayaan pemakai terhadap layanan *e-government*, berupa keamanan data pribadi dan hasil layanan (hasil olahan data) dapat dipercaya kebenarannya. Sejauh ini dalam penerapan SIMDA, keamanan data pribadi maupun data informasi keuangan terjaga karena sebelum menggunakan aplikasi Simda, para pengguna telah didata saat penginstalan aplikasi di BPKD, sehingga masing-masing pengguna hanya bisa mengakses hal-hal sesuai tupoksi, sehingga meminimalisir kesalahan akses informasi. Hasil data informasi pengelolaan keuangannya juga dapat dipercaya, sebab data telah diolah secara digital, maka kesalahan data menjadi minim.

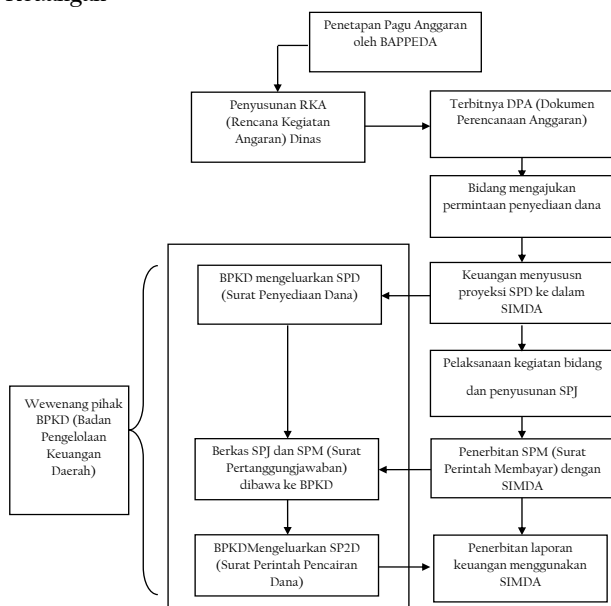
Untuk *login* ke akun Simda Keuangan juga memerlukan *username* dan *password* pengguna, ini adalah pembuktian keamanan Simda, sebab hanya pihak tertentu yang dapat mengaksesnya. Tampilan fitur yang bisa diakses oleh pengguna dibatasi sesuai tugas, misalnya, bendahara pengeluaran hanya bisa mengakses informasi sesuai tugasnya. Dapat dilihat pada Gambar.8, fitur yang bisa diakses oleh bendahara pengeluaran berwarna hitam dan fitur bertulisan warna abu-abu (fitur mati) tidak akan bisa di klik atau diakses sebab merupakan wewenang pihak yang hanya diberikan akses oleh BPKD.

Ketiga, *functionality of the interaction environment* (bantuan form), yaitu kemampuan penyediaan layanan dalam berinteraksi dengan pengguna aplikasi, respon saat menghadapi kendala dan semacamnya. Aplikasi Simda Keuangan belum mempunyai wadah interaksi antara pengguna dan *user system* di BPKD, sehingga saat menghadapi kendala pihak pengguna harus ke BPKD, membuat telaah terlebih dahulu atau melaporkan lewat kontak telepon yang harus diminta ke BPKD ketika memerlukan bantuan. Keempat, *content and appearance of information* (konten dan tampilan), yaitu kelengkapan data, informasi dan akurasi data yang disediakan sistem harus sesuai kebutuhan pengguna. Konten dan tampilan Simda Keuangan sudah lengkap, namun beberapa data justru masih harus di input secara manual seperti kode nomor rekening, NPWP, nomor SPP dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, memunculkan kemungkinan terjadinya kesalahan inputan data. Apalagi, saat ini Simda keuangan telah mengalami pembaharuan dengan penetapan kode nomor rekening yang berbeda antara Simda keuangan dan DPA selaku pendoman bidang dalam menetapkan penggunaan anggaran, sehingga jika bendahara tidak sengaja memasukkan satu saja kode rekening yang salah, maka dampaknya cukup fatal.

Kelima, *citizen support* (dukungan masyarakat), indikator ini sangat dibutuhkan karena keberlangsungan suatu kebijakan bergantung pada dukungan dari masyarakat. Dalam penelitian ini, dukungan masyarakat peneliti kategorikan sebagai support dari penerima manfaat penggunaan aplikasi Simda yaitu ASN dan THL (Tenaga Harian Lepas) di Distranaker sebab dampak penggunaan Simda Keuangan tidak melibatkan pihak masyarakat dalam makna umum. Para ASN dan THL memberikan respons positif dalam penerapan Simda karena merupakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman serta bisa mempercepat proses pelayanan

terkait pencairan dana sehingga penerima manfaat sangat mendukung.

Prosedur dan Alur Pengelolaan Keuangan Berbasis Simda Keuangan



Bagan.1 Alur Pengelolaan Keuangan Berbasis Simda Keuangan di Distranaker Kabupaten Aceh Barat

Berikut penjelasan lebih lanjut dari penampakan Bagan

1. Alur Pengelolaan Keuangan berbasis Simda Keuangan Pada Sub bagian Keuangan Distranaker Aceh Barat:

1. Aktivitas pengelolaan keuangan akan mulai dilaksanakan pada awal triwulan I, yaitu bulan pertama tahun anggaran setelah pihak BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) resmi menetapkan pagu anggaran (penetapan alokasi dana untuk membiayai belanja pemerintah) bagi kedinasan.
2. Kemudian pihak kedinasan memiliki wewenang menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dengan melibatkan seluruh bidang kerja untuk menghasilkan *output* berupa DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) sebagai pedoman umum penganggaran kegiatan bidang, setelahnya bidang dapat mengajukan permintaan penyediaan dana
3. Pihak Sub Bagian Keuangan lalu menyusun proyeksi SPD (Surat Penyediaan Dana), dan bidang sudah diperbolehkan mengajukan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai DPA, sebelum mengajukan, pihak bidang harus berkonsultasi dengan bendahara untuk melihat ketersediaan SPD di BPKD, jika tersedia, maka proses penganggaran akan dimulai, diikuti pelaksanaan kegiatan oleh bidang
4. Setelah kegiatan dilaksanakan, bidang wajib menyiapkan berkas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagai bukti kebenaran pelaksanaan kegiatan dibarengi pemeriksaan berkas oleh verifikator. Saat berkas SPJ lengkap, bendahara mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) maupun SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) menggunakan Simda keuangan, serta melengkapi dokumen pendukung lainnya (SPTJB, *e-billing*, SPTJM, dan lain-lain).

Berkas tersebut kemudian di ekspor ke BPKD (satu rangkap), setelah diproses, BPKD akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang menjadi komponen dasar dalam

pembuatan laporan keuangan dari triwulan I hingga triwulan IV dengan memanfaatkan aplikasi Simda.

Kendala dan Dukungan Realisasi Simda Keuangan

Uraian mengenai kendala dan dukungan dalam implementasi suatu kebijakan sangat diperlukan. Penguraian kendala nantinya dapat menjadi takaran dalam mengukur kebermanfaatan kebijakan serta dapat pula dijabarkan untuk mencari solusi agar keberadaan kebijakan dapat memberi manfaat maksimal, termasuk dalam menilai realisasi kebijakan penggunaan Simda keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi dalam realisasi aplikasi Simda diantaranya sebagai berikut.

1. Gangguan jaringan, ketika jaringan terkadang eror atau bermasalah maka mengakibatkan gangguan saat pengoperasian Simda Keuangan, karena Simda sendiri merupakan aplikasi *online* yang senantiasa memerlukan akses jaringan (internet) dalam pengoperasiannya.
2. Kendala perbedaan rekening, Simda Keuangan versi tahun 2021 memiliki perbedaan dibanding versi sebelumnya, dimana kode nomor rekening pada Simda yang dipakai Subbag Keuangan dan DPA sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bidang berbeda, sehingga terkadang menyulitkan pengguna dalam penginputan data (kesamaan antara keduanya hanya terletak pada kegiatan dan sub kegiatan bidang)
3. Kendala SDM, kekurangan staf akuntansi merupakan masalah yang dihadapi Subbag Keuangan selaku pengguna Simda, padahal struktur kepengurusan sudah jelas namun sayang posisi tersebut masih kosong sehingga ketika masa sibuk, kinerja Subbag Keuangan akan menurun
4. Penginstalan dan ekspor impor data masih secara manual, berkas SPJ yang harus dibawa ke BPKD masih dalam bentuk cetak (belum digital), dan kegiatan transfer data belum memanfaatkan jaringan internet namun hanya menggunakan perangkat keras berupa flashdisk (interaksi pengiriman berkas belum digital). Selain itu penandatanganan dokumen masih manual (belum menggunakan *barcode* atau semacamnya) yang dapat berdampak pada lamanya proses administrasi ketika pihak yang dibutuhkan tidak berada di tempat
5. Belum adanya fitur interaksi pada Simda keuangan, sebagai wadah untuk berinteraksi dengan pihak Simda di BPKD ketika menghadapi kendala agar penyelesaian kendala dapat bersifat segera.
6. Proyeksi tidak dapat lagi di konversikan dari Simda diakibatkan perbedaan kode nomor rekening antara Simda dan DPA, maka proyeksi anggaran harus di ketik secara manual sesuai DPA.
7. Belum adanya pedoman baku penggunaan dan bimbingan sosialisais pemakaian Simda, tiap tahunnya aplikasi Simda selalu terupdate dan di instal ulang, namun dalam penggunaannya belum ada pedoman baku berupa buku cetak, *e-book* atau sejenisnya sehingga bagi pengguna pemula akan kewalahan dalam mengoperasikan Simda Keuangan.

Selain kendala, pihak Distranaker Aceh Barat juga mendukung keberadaan aplikasi Simda Keuangan dengan alasan,

1. Kegiatan pengolahan data keuangan menjadi lebih mudah dibanding secara manual: aplikasi Simda Keuangan terbukti menjadikan aktivitas pengelolaan keuangan lebih mudah, efektif, dapat dipercaya, efisien dan tidak terlalu rumit dibanding secara manual.
2. Data yang diinput dapat terjaga dengan baik dengan keamanan terjamin dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja
3. Tampilan aplikasi mudah dipahami: melalui pembelajaran dan praktik *continue* dan kemampuan menggunakan

komputer maka penggunaan Simda keuangan dapat dikuasai.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan penerapan *e-government* melalui penggunaan aplikasi Simda Keuangan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meulaboh cukup baik, terbukti dari keberhasilan terpenuhinya indikator penilaian implementasi Simda keuangan melalui teori Edward III (komunikasi dan disposisi). Pihak subbag keuangan telah mampu memahami tugasnya terkait kebijakan realisasi Simda keuangan dengan cukup baik diikuti skill mumpuni, sikap pengguna dan penerima manfaat juga menunjukkan respons positif yaitu mendukung keberadaan Simda keuangan, namun subbag keuangan masih menghadapi kendala implementasi berupa belum terpenuhinya struktur kepengurusan sesuai aturan seperti kekurangan staf akuntansi dan belum adanya pedoman (SOP) dalam menggunakan Simda yang menjadi alasan implementasi Simda keuangan belum secara mutlak berhasil.

Keberhasilan Simda dalam mendukung penerapan *e-government* juga baik, dimana penggunaan Simda keuangan pada lokasi penelitian telah memenuhi kriteria layanan berkualitas sesuai konsep layanan *e-government* seperti Simda keuangan mudah dimengerti dan digunakan, data olahan dan informasi yang dihasilkan dapat dipercaya, konten dan tampilannya sederhana dan data informasi yang diperlukan juga lengkap, serta masyarakat selaku pihak ASN maupun THL penerima manfaat Simda keuangan mendukung dan memberi respons baik terkait realisasi Simda keuangan sebab mempermudah aktivitas yang sebelumnya rumit.

Penerapan suatu kebijakan tak selamanya mulus tanpa kendala, hal ini pun dirasakan dalam penerapan Simda keuangan, diantaranya gangguan jaringan, perbedaan kode rekening antara Simda dan DPA, masih kurangnya jumlah SDM, ekspor impor data masih secara manual, belum adanya fitur interaksi pada aplikasi serta tidak adanya pedoman baku maupun sosialisasi penggunaan Simda keuangan. Meski demikian, pihak subbag keuangan dan pihak kedinasan tetap mendukung keberadaan Simda karena memang memberikan kemudahan pengelolaan keuangan, sangat efektif dan efisien. Maka, untuk mendukung implementasi Simda keuangan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meulaboh ialah dengan menyediakan akses jaringan berkualitas (sebaiknya bebas error), diadakannya sosialisasi disertai penerbitan panduan penggunaan Simda keuangan maupun Simda lainnya, pemenuhan SDM sesuai kebutuhan, dan dapat lebih maksimalnya jumlah kegiatan pengelolaan keuangan yang terkonversi menjadi berbasis digital agar mampu mewujudkan layanan berkualitas berkonsep *e-government*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sekaligus Pembimbing Akademik (PA) saya, Bapak Nodi Marefanda, S.Pi, M.AP yang sangat berjasa dalam penyelesaian artikel, serta kepada supervisor magang saya Buk Dara Amelia, SE, M.Si pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Meulaboh yang senantiasa mengayomi dan memberi arahan sehingga penulis mampu mengkhataamkan artikel ilmiah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan dari semua. Aamiin.

REFERENSI

Authenticated U.S Government Information. (2002). *Public Law 107 – 347 107th Congress An Act*.
BPKP. (2020). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah*

- (SIMDA). Bpkp.Go.Id.
<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>
- Darea, D. W., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Dppka Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA*, 3(2), 114–122.
- Dewi, N. C., & Mariska, S. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3(1).
- Edward, III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional, Quartely Press.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. GP Press.
- Hertanto, Y., Domai, T., & Amin, F. (2016). Penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(2), 15–24.
- McLeod, R. (2010). *Sistem Informasi Manajemen*. Salemba Empat.
- Papadomichelaki, X., & Gregoris, M. (2012). E-Govqual: A multiple-item Scale for Assessing E-government Service Quality. *Government Information Quarterly*, 29(1).
- Polii, I. R. A., & Pontoh, W. (2018). Ipteks Pengendalian Intern Simda Keuangan Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 02(02), 246–250.
- Rahantoknam, T. A., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 754–761.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65.
- Sutopo, A. H., & Arief, A. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Prenada Medica Group.
- Yanto, E., & A, M. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonom*, 5(1).